

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok dengan tujuan mengatur perilaku merokok warga masyarakat Yogyakarta di tempat-tempat umum, utamanya perilaku merokok warga masyarakat di sarana atau tempat umum seperti tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat spesifik sebagai tempat belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Namun dalam pelaksanaan (Pergub) kawasan dilarang merokok, masih ada sarana atau tempat umum yang belum tertib melaksanakan (Pergub) kawasan dilarang merokok, misalnya dikawasan Terminal Bus Giwangan Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pergub kawasan dilarang merokok, dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan (Pergub) ini. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan hukum empiris yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan hukum empiris, dilakukan dengan cara wawancara. Lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dikawasan Terminal Giwangan. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat, sedangkan narasumber penelitian ini adalah pihak Dinas Kesehatan Provinsi D.I.Y, dan pihak Muhammadiyah *Tobacco Control Center* (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan (Pergub) No. 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok belum berjalan secara maksimal, dikarenakan masih ada warga masyarakat yang merokok di tempat atau sarana umum yang dilarang merokok, misalnya dikawasan Terminal Giwangan. Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan (Pergub) kawasan dilarang merokok adalah kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi D.I.Y dengan Satuan Kerja Daerah lainnya, masih ada warga masyarakat yang tidak mengetahui tentang Pergub kawasan dilarang merokok, rendahnya kesadaran perilaku perokok aktif untuk tidak merokok di tempat umum, tidak adanya sanksi tegas yang diberikan pemerintah pada warga masyarakat yang merokok dikawasan dilarang merokok.

Kata Kunci : Pelaksanaan Kebijakan, (Pergub) D.I.Y Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok.